

Demokratisasi dalam Pendidikan: Pendidikan Berbasis Karakteristik Masyarakat Lokal

Agus Sultoni

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: maulanakandiyas@gmail.com

Abstract Education has a clear object, namely humans. Understanding the nature of human nature, obtained an overview of the characteristics map about humans. The democratization of education can be realized, one of which is through community-based education in a national education organization. Community-based in question is a local community with all the special characteristics it bears. By paying attention to the map of the characteristics of the local community, giving a foothold to the stakeholders to maximize the effectiveness of education - which is expected to be right on target. Schools as formalized educational institutions cannot take their roles as a whole. Two environments should not be ignored from the calculation of determining the success of students: the family environment and social environment. To achieve synergy, concrete steps must be framed in the spirit of communication and dialogue. The dialogue will open the veil of misunderstanding caused as a result of differences in thinking and perspective. The approach most relevant to this study is the socio-cultural approach. The material taught maybe a package from the institution that holds the authority of the policy, but the method of how to deliver the material is the responsibility of the Educator. The success of the packaged material is about how the Educator's method of distributing, transferring knowledge so that it can be fully accepted by students.

Keywords: Democratization, Education, Characteristics, Local Communities.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi

Pendidikan memiliki obyek yang jelas, yaitu manusia. Pendidikan dimaksudkan menggali potensi manusia itu sendiri sebagai bekal tanggungjawabnya menjalani kehidupan di dunia. Pendidikan mendapatkan predikat tepat guna, jika para pelaku pendidikan memahami hakikat manusia dengan segala potensinya secara deskriptif komprehensif. Dengan memahami sifat hakikat manusia, terbentuklah peta karakteristik tentang manusia. Lebih luas, apa yang dinamakan “masyarakat” sebagai perkumpulan/ kelompok dari individu-individu manusia, tidak bisa dilepaskan dari karakteristik tertentu yang membentuknya.

“Masyarakat” dalam hal ini secara umum mengacu pada pendapat Gerhard yang membagi masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu geografik dan kultural.¹ Geografik artinya terbentuknya masyarakat secara fisik berdasarkan kesamaan tempat dan lingkungan. Kultural artinya terbentuknya masyarakat secara psikis berdasarkan kesamaan tradisi dan budaya, termasuk agama. Daya guna pendidikan, selanjutnya harus mempertimbangkan aspek ini, yaitu karakteristik masyarakat yang mendiami tempat dan wilayah tertentu, serta tradisi dan budaya tertentu. Istilah “lokal” dimaksudkan mengafiliasi pada sesuatu yang spesifik dengan wilayah jangkauan (geografik) dan pengaruh (kultural) terbatas, dan di sinilah kemudian keunikan itu terbentuk.

Dengan memperhatikan peta karakteristik masyarakat lokal, memberi pijakan kepada para pemangku kebijakan guna memaksimalkan daya guna pendidikan yang – diharapkan bisa tepat sasaran. Karena secara ontologis, ilmu – yang menjadi materi pendidikan – adalah manusia itu sendiri. Perjalanan manusia dalam menemukan jawaban atas ketidaktahuannya tentang berbagai macam hal. Dengan demikian, tujuan ilmu dari masa ke

¹ Gerhard Emmanuel Lenski, *Human Societies: an Introduction to Macrosociology*, (Kogakusha: McGraw-Hill, 1978), hlm. 55.

masa, dan dari konteks ke konteks, tidak boleh dilepaskan dari realitas dan tantangan manusia itu sendiri. Penekanan masalah ini adalah bagaimana menghadapi tantangan manusia yang bersifat umum, dengan menggali tindakan solutif inovatif sehusus mungkin berdasarkan kekhasan dan keunikan masyarakatnya.

Untuk itu, kajian sosiologis antropologis dalam pendidikan lebih diharapkan mendapatkan tempat di sini. Apa yang disebut sebagai muatan lokal dalam kurikulum harus lebih ditambah porsi. Ini bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan praktisi/ para guru di tingkat akar rumput yang tidak hanya sebagai Pendidik *an sich*, tetapi juga sebagai pemikir. Kebijakan pemerintah yang menaikkan standar kualifikasi dari S1 menjadi minimal S2 untuk para praktisi/ guru sepertinya layak diapresiasi, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pandang bulu bisa diwujudkan di tingkat lokal-lokal.

B. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Demokratisasi Pendidikan

Gagasan tentang demokratisasi ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan. Masyarakat tidak lagi dihadapkan pada sekedar retribusi sumbangan/ keuangan, tetapi berperan aktif dalam pengkajian, mengidentifikasi masukan dan permintaan semua *stakeholder* terkait kompetensi lulusan yang diharapkan.² Demokratisasi pendidikan dimaksudkan sebagai sebuah proses mewujudkan tatanan demokrasi dalam bidang pendidikan. Pemahaman tentang pendidikan demokrasi menurut Azyumardi Azra, dikatakan sebagai sosialisasi, deseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem,

² Ahmad Arifin Zain, *Demokrasi Pendidikan Berbasis Masyarakat*, dalam http://atthamimy.blogspot.com/2014/11/demokrasi-pendidikan-berbasis-masyarakat_19.html, diakses hari Jum'at, 11 Oktober 2019, pukul 14.40 WIB.

nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan.³ Diharapkan melalui pendidikan demokrasi melahirkan kesadaran masyarakat yang berkeadaban, sehingga berkontribusi menciptakan kondusifitas demokrasi dalam bingkai otentisitas ke-Indonesi-an sebagai jatidiri bangsa.⁴ Mengingat Indonesia merupakan Negara demokratis terbesar di dunia,⁵ yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu cukup baik merespon tuntutan modernisasi di berbagai bidang.

Demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan, salah satunya melalui pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbasis masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat lokal dengan segala kekhasan karakteristik yang disandangnya. Penerapan ini dimaksudkan supaya pendidikan tidak menjadi alat penguasa. Tetapi, secara spesifik mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi sumber daya alam maupun kompetensi sumber daya manusianya. SDA bersifat statis sementara SDM bersifat dinamis. Pendidikan yang tidak mempertimbangkan pengertian keadaan masyarakat, tidak akan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan sebagai bekal kehidupan secara sempurna. Masyarakat merupakan organisme hidup, yang senantiasa berada “dalam kejadian”, sehingga tidak pernah selesai dan selalu diperbarui. Karenanya, daya gerak masyarakat menimbulkan masalah baru.⁶

Masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dengan tetap mengacu pada

³ Azyumardi Azra, “Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi” dalam <http://www.kompas.com/%2Dcetak/0103/14/opini/pend04.htm>, dalam Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. I., (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 181.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 3.

⁶ Irfan Hielmy, *Pesan Moral dari Pesantren: Meningkatkan Kualitas Umat Menjaga Ukhuwah*, (Bandung: Nuansa, t.t.), hlm. 117.

standar pendidikan nasional.⁷ Di ranah lokal,⁸ suasana pembelajaran seyogyanya dapat diarahkan pada paradigma baru dalam hubungan yang bersifat egaliter, kesetaraan dan keberimbangan – dengan tanpa mengesampingkan peran masing-masing. Perbedaan sikap, sifat, dan pemikiran masing-masing Peserta didik harus ditempatkan pada posisi kewajaran sebagai manusia murni yang masih banyak membutuhkan pengarahan, asupan pengetahuan, dan pengasahan potensi. Ini adalah sebagai bentuk inovasi kreatif progresif dalam strategi dan metode pembelajaran yang mengedepankan aspek kultural dan etika.

Pembelajaran tidak lagi mengadopsi sistem kekerasan dimana Pendidik secara otoriter memegang kendali kelas, tetapi diarahkan memenuhi prinsip-prinsip nilai perdamaian, menghasilkan budaya damai yang diharmoniskan dengan budaya lokal dan konsensus bersama. Pengembangan pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi kondisi sekolah dan sosio kultur masyarakat setempat. Diperlukan pengelolaan kelas yang fleksibel, kondusif dan sederhana; pola komunikasi pembelajaran; serta strategi metode penyampaian materi yang humanistik, sehingga antara pelaku pembelajaran terjalin interaksi yang demokratis.⁹

Demokratisasi pendidikan menghendaki tercapainya sinergitas kompetensi peserta didik baik secara kognitif-psikomotorik-afektif. Jika dimaksudkan untuk pendidikan Islam, maka dimungkinkan memasukkan satu kompetensi yang menjadi landasan utamanya, yaitu spiritual. Adapun strategi dan metode pembelajarannya adalah terjadinya tawar menawar antara pelaku pembelajaran dalam menentukan tujuan, materi, media, dan

⁷ Kartini Kartolo, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, cet. I., (Jakarta: Pradya Paramita, 1997), hlm. 196-7.

⁸ Husaini Usman, “Menuju Masyarakat Madani melalui Demokratisasi Pendidikan” dalam Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 182.

⁹ M. Nurul Ikhsan Saleh, *Peace Education: Kajian Sejarah, Konsep, dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2002), hlm. 78.

evaluasi hasil belajar.¹⁰ Cita-cita ini agaknya tidak terlalu sulit untuk diwujudkan, mengingat politik bangsa Indonesia sudah memasuki reformasi (dikatakan: pasca orde baru), artinya demokrasi bisa memungkinkan mendapat tempat yang selayaknya.

Menurut Zamroni, reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan dapat dilakukan dalam tiga aspek, yaitu: regulatori, profesionalitas, dan manajemen.¹¹ Regulatori menitikberatkan pada reformasi, rekonstruksi dan inovasi kurikulum. Kurikulum sebagai materi pendidikan tidak boleh menjadi beban Peserta didik melalui sejumlah bahan pelajaran yang dipelajari, tetapi orientasi materi lebih diarahkan pada bagaimana Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹² Profesionalitas ditujukan kepada Pendidik dalam menjalankan tugas kependidikannya. Sementara pada manajemen, diupayakan mengubah pusat pengambilan dan kendali pendidikan yang dibagi kepada dua subyek, sekolah dan masyarakat. Kebijakan pertama menumbuhkan manajemen berbasis sekolah, dan kebijakan kedua menumbuhkan pendidikan berbasis masyarakat.

Berbicara pendidikan berbasis masyarakat, menurut Azyumardi Azra, “kalangan masyarakat Muslim Indonesia, secara praktis sebenarnya telah diterapkan sejak lama.”¹³ Potret kehidupan pondok pesantren dengan segala aktifitasnya, adalah contoh model nyata dan bahwa kekhasan metode dan strategi pembelajaran itu bisa diterapkan. Hanya memang secara teoritis filosofis, belum terkonsep secara jelas dan sistematis

¹⁰ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. I., (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 183.

¹¹ Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: tantangan menuju Civil Society*, cet. I, (Yogyakarta: Bigraf, t.t.), hlm. 10-11. Dalam Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 178.

¹² Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 210.

¹³ Azyumardi Azra, “Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah”. Dalam Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 179.

aplikatif, diperlukan formulasi dan rekonstruksi pendidikan berbasis masyarakat ini. Upaya bahu membahu oleh segenap pemangku kebijakan dari tingkat pusat sampai akar rumpun, pemikir sampai praktisi, maupun pengguna pendidikan supaya diperoleh gambaran yang aplikatif dan komprehensif.

2. Urgensi Memahami Karakteristik Masyarakat Lokal

Budaya lokal adalah budaya asli yang bersumber dari nilai religius, adat tradisi, kebiasaan, dan petuah nenek moyang sebagai ciri khas berinteraksi dalam geografis kelompok itu. Secara spesifik, budaya lokal di setiap daerah di Indonesia, meliputi berbagai macam kesenian dan hukum adat.¹⁴ Masyarakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah *Community* (masyarakat setempat), yaitu skala lebih kecil atau sub-kelompok dari *society* (masyarakat umum). Kepentingannya kurang luas dan kurang terkoordinasi, namun memiliki asosiasi kuat dan simpatik mendalam. Membentuk kekhasan koheren seperti; ras, asal-usul daerah, maupun agama.¹⁵ Ciri-cirinya;¹⁶ (1). Memiliki kemampuan mengendalikan, mempertahankan, mengakomodasi terhadap budaya luar; (2). Memberi arah terhadap perkembangan budaya secara umum; (3). Memiliki kemampuan mengintegrasikan budaya asli dari dalam dan dari luar.

Masyarakat Indonesia sangat pluralis baik dari segi suku, etnik, agama, bahasa, geografis, dan budaya berkehidupan. Bhinneka Tunggal Ika, pada satu sisi sebagai simbol normatif kekayaan Indonesia. Namun, di sisi lain (baca: empirik) mengindikasikan heterogenitas, pluralitas,

¹⁴ <https://ilmuseni.com/dasar-seni/pengertian-budaya-lokal-dan-contohnya>, diakses hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 16.27 WIB.

¹⁵ Henry Pratt Fairchild (ed.), *Dictionary of Sociology*, (Totowo, New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1977), hlm. 52, dalam Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 184.

¹⁶ <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/>, diakses hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 16.47 WIB.

kompleksitas, dan multikulturalisme. Menurut penelitian Geertz¹⁷ di Indonesia terdapat 300 lebih suku bangsa, menggunakan 250 ragam bahasa 250, dengan karakteristik budaya berbeda pula. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi geografis dan iklim yang mempengaruhinya. Bisa dikatakan, Indonesia bagaikan bangunan besar dengan banyak orang berteduh di dalamnya.

Karakteristik budaya dengan landasan nilai-nilai yang berbeda itu dapat memicu konflik personal-sosial. Dibutuhkan rekonstruksi budaya dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, konsensus, rasa menghargai, toleransi tinggi, dan solidaritas di antara anggota masyarakat yang mendiami komunitas bersama.¹⁸ Masing-masing kelompok masyarakat dengan karakteristik khusus yang menjadikan fakta-fakta kehidupan tidak bisa digeneralisasi. Ikatan emosional kuat dibalut budaya berkehidupan berbeda meniscayakan perlawanan yang tidak koheren dengan mereka sehingga sulit menerima hal-hal baru menembus kesadaran mereka.¹⁹

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diformalkan, tidak bisa mengambil perannya secara menyeluruh. Tidak pula dipandang sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan Peserta didik. Sehari dalam 24 jam, paling maksimal di lingkungan sekolah adalah 9 jam. Selebihnya 15 jam berinteraksi dengan keluarga, dan masyarakat. Artinya, ada dua lingkungan yang tidak boleh diabaikan dari perhitungan menentukan keberhasilan Peserta didik adalah lingkungan keluarga (informal) dan lingkungan sosial (non-formal). Bahkan dalam kedua

¹⁷ Clifford Geertz, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1981. Dalam <http://www.nafiun.com/2013/02/budaya-lokal-pengertian-macam-macam-contoh-ciri-ciri.html>, diakses hari Jum'at 11 Oktober 2019, pukul 13.36 WIB.

¹⁸ <http://www.nafiun.com/2013/02/budaya-lokal-pengertian-macam-macam-contoh-ciri-ciri.html>, diakses hari Jum'at 11 Oktober 2019, pukul 13.47 WIB.

¹⁹ Mujamil Qomar, *Fajar Baru...*, hlm. 225-6.

lingkungan ini Peserta didik memperoleh kepribadian terkuatnya dalam pembentukan karakter pribadi dan pola pikir. Contoh; kenakalan Peserta didik sebagai akibat dari lingkungan keluarga *broken home*. Ketidakpedulian Peserta didik dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan pada masyarakat Pesisir.

Untuk keberhasilan mewujudkan tujuan pendidikan secara komprehensif, ketiga lingkungan di atas harus bersinergi harmonis.²⁰ Untuk mencapai sinergitas harus melakukan langkah-langkah kongkret yang dibingkai dalam semangat komunikasi dan dialog. Dialog akan membuka tabir kesalahpahaman yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbedaan pemikiran dan cara pandang. Muaranya jelas, yaitu upaya menyatukan kehendak demi tercapainya cita-cita luhur bersama. Sebaliknya, tujuan pendidikan dikhawatirkan mengalami kegagalan, jika ketiga lingkungan tersebut *dis*-harmonis. Sebagai contoh, sekolah memposisikan diri sebagai superioritas, sehingga enggan “menyapa” keluarga dan masyarakat. Atau ketidakpedulian keluarga terhadap kondisi perkembangan Peserta didik, karena telah mempercayakan keberhasilannya pada pihak sekolah.

3. Pendidikan Berbasis Karakteristik Masyarakat Lokal

Berdasarkan kepentingannya, pendidikan bisa dijelaskan dalam tiga dimensi. *Pertama*, berdasar kepentingan masyarakat. Yaitu pendidikan dimaksudkan sebagai upaya mewariskan tradisi, *value*, doktrin, budaya dari generasi tua ke generasi muda – terlepas ada relevansinya dengan Peserta didik, maupun tidak. *Kedua*, berdasar kepentingan Peserta didik. Pendidikan dimaksudkan menggali berbagai potensi Peserta didik terhadap situasi-kondisi yang secara sengaja dipersiapkan untuk itu. Pendidikan

²⁰ Moh. Hailami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, cet. IV, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 272.

dalam orientasi ini menuntut proses pembelajaran yang beragam, variatif dan dinamis. *Ketiga*, berdasar kepentingan masyarakat dan Peserta didik.²¹

Menurut Enoch kepentingan yang termanifestasi dalam permintaan masyarakat memiliki sasaran yang menekankan kepada faktor kependudukan, tujuan nasional yang sesuai dengan aspirasi sosial-politik, serta kebutuhan personal.²² Adanya perbedaan nilai budaya dan sosial, perlu dilakukan secara berkesinambungan perbaikan terhadap metode proyeksi dan analisis demografi. Karena dalam perencanaan pendidikan harus mengetahui metode, keragaman nilai, prinsip-prinsip kontinuitas, kecenderungan, dan orientasi masa depan suatu masyarakat.²³ Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka tidak ada dikotomi antara kehidupan pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan non-formal di masyarakat. Semuanya mengindikasikan bahwa pendidikan diarahkan pada terciptanya kehidupan dinamis modern dengan tetap berpijak pada pelestarian budaya masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, supaya terjamin konsistensi pola dua arah tersebut, maka desain pembelajaran harus diselaraskan dengan kondisi kehidupan masyarakat setempat.

Ada sinergitas antara pendidikan dan latar sosio-kultural, karena mengupayakan pendidikan hakikatnya adalah memelihara kebudayaan.²⁵ Mendalami kondisi sosiologis, geografis, dan psikologi masyarakat diperlukan supaya pendidikan menjadi tepat sasaran dan tujuan sehingga perubahan demi perubahan menuai kesuksesan. Karena bisa jadi,

²¹ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, cet. II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 367-8.

²² J. Enoch, *Perencanaan dan Pengelolaan*, (Jakarta: FPS IKIP Jakarta, 1986), dalam Endang Soenarya, *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 67.

²³ Endang Soenarya, *Pengantar Teori...*, hlm. 84.

²⁴ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan...*, hlm. 389.

²⁵ Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sula, *Pengantar Pendidikan*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 131.

kegagalan-kegagalan pada Peserta didik bukan disebabkan oleh substansi materi yang disampaikan, tetapi pendekatan metode dan strategi kepada mereka yang kurang tepat. Pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa pengetahuan baru apapun tidak bisa dipaksakan secara mendadak. Membutuhkan waktu adaptasi, untuk kemudian menerima transfer ilmu – hal ini bukan berarti tiada celah untuk penyisipan pesan.²⁶

Dalam strategi pendidikan harus mempertimbangkan kendala-kendala fisik dan non-fisik, termasuk lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan hasil maksimal, pada dimensi operasionalisasinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana proses pembelajaran diterapkan. Oleh karena point utamanya adalah pendidikan dari masyarakat, maka harus dirancang bersinergi dengan kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang.²⁷ Misalnya, penanganan terhadap Peserta didik dari berbagai latar belakang geografis, seperti masyarakat pesisir, pedesaan, perkotaan, pinggiran, perkebunan, pegunungan, dan sebagainya. Masing-masing memiliki karakteristik khasnya masing-masing dan kebutuhan berbeda-beda terhadap pentingnya pendidikan.

Pendekatan yang paling relevan dengan studi ini adalah pendekatan sosio kultural, dimana manusia disekripsikan sebagai makhluk yang bermasyarakat sekaligus berkebudayaan. Analogi yang tepat dan telah terbukti dalam masalah ini adalah sebagaimana para Pendakwah agama Islam yang melalui pendekatan itu mendapat respon positif di masyarakat setempat. Umat Islam Indonesia sangat akrab dengan budaya, sehingga khazanah mereka terkait budaya sangat besar. Menerjemahkan materi-materi ajaran agama dalam konteks idiom-idiom baik budaya lokal

²⁶ Mujamil Qomar, *Fajar Baru...*, hlm. 225.

²⁷ Moh. Hailami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu...*, hlm. 210-212.

maupun budaya nasional. Bisa dikatakan bahwa pendekatan kultural ini unik dan khas, sekaligus cukup efektif, dan berhasil gemilang.²⁸

Dalam tinjauan sosio-kultural di era modern ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pusat mentransfer ilmu, tetapi membaur dengan dimensi sosial. Kedudukan dalam dimensi sosial bersifat strategis dan kritis. Strategis mengandung maksud bahwa pendidikan memiliki kekuatan mewarnai corak kehidupan. Pendidikan mengendalikan keberlangsungan hidup masyarakat. Kritis berarti, memposisikan sebagai bagian institusi sosial dengan melakukan adoptif-adaptif, sehingga tidak ada kesenjangan antara kehidupan nyata dengan semangat idealitas pendidikan. Pendidikan harus menghasilkan lulusan yang selaras dengan kehidupan yang berkembang pesat.²⁹

Oleh karena itu dalam pendidikan, Pendidik dituntut memiliki kompetensi sosial supaya mampu menjalin komunikasi secara efektif baik di lembaga fomal Sekolah, maupun non formal masyarakat, yaitu:³⁰ mempunyai wawasan tentang adat istiadat sosial-agama, budaya, tradisi, prinsip-prinsip demokrasi, estetika. Memiliki kesadaran sosial, menjiwai pekerjaannya, serta memperhatikan harkat dan martabat manusia. Itulah yang disebut sebagai Pendidik professional dengan kompetensi sosial yang melekat, dimana kompetensi ini mengkombinasikan kemampuan Pendidik dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama.

4. Kebutuhan Tenaga Pendidik sekaligus sebagai Pemikir

²⁸ Mujamil Qomar, *Fajar Baru...*, hlm. 34-5.

²⁹ As'Aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, Cet. III, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), hlm. 22-3.

³⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2016/03/kompetensi-sosial.html>, diakses hari Jum'at 11 Oktober 2019, pukul 14.29 WIB.

Sedikitnya ada lima prasyarat terpenuhinya Pendidik ideal;³¹ *Pertama*, keterampilan yang merefleksikan keilmuan secara mendalam. *Kedua*, memfokuskan diri pada keahlian tertentu yang sesuai profesinya. *Ketiga*, tingkat kualifikasi keguruannya. *Keempat*, menyadari dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari profesi yang diembannya di masyarakat. *Kelima*, mengikuti perkembangan dinamika sosial. Point yang hendak ditekankan dalam rumusan prasyarat tersebut adalah, Pendidik harus memiliki keluasan ilmu sesuai yang digelutinya. Dengan penguasaan ilmu mendalam, Pendidik akan mampu melakukan inovasi-inovasi kreatif dalam memecahkan permasalahan baru di lapangan. Pendidik tidak boleh melakukan kesalahan diagnosa, sehingga diharapkan memperoleh solusi yang tepat sasaran.

Oleh karenanya, selain harus memiliki dasar ilmu kuat, Pendidik professional dituntut harus menguasai strategi berbasis penelitian lapangan.³² Sebuah kemampuan mengkombinasikan pengetahuan teoritis dengan praktik aplikatif. Mencurahkan segenap daya kemampuan dan kemauan untuk menemukan solusi-solusi dinamis dalam menyikapi dinamika kehidupan yang terus berkembang. Materi yang diajarkan bisa saja merupakan paket dari institusi pemegang otoritas kebijakan, tetapi strategi metode cara menyampaikan materi lebih banyak menjadi tanggungjawab Pendidik. Keberhasilan materi yang dipaketkan adalah tentang bagaimana strategi metode Pendidik mendistribusikan, melakukan transfer ilmu sehingga bisa diterima sepenuhnya oleh Peserta didik.

³¹ Menurut M. Ali seperti dikutip Moh. User Utsman, *Menjadi Guru Professional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2001), hlm. 15, dalam Moh. Hailami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu...*, hlm. 145.

³² HAR Tilaar, dikutip oleh Agus Maimun, *Madrasah for Tomorrow: Madrasah Masa Depan*, (Jakarta: Proyek EMIS DEPAG RI, 2001), hlm. 29-30, dalam Moh. Hailami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu...*, hlm. 162-3.

Kriteria Pendidik professional yang mendukung terciptanya peran ganda sebagai Pemikir, adalah: (1) Tidak berhenti berkarya, aktif melakukan penelitian sederhana untuk keperluan pembelajaran, (2) memiliki semangat mengembangkan keilmuan, wawasan dan pengalaman melalui workshop, pelatihan, dan diklat, (3) berperan aktif *up to date* terhadap informasi dan permasalahan aktual, (4) kreatif, dan inovatif mengembangkan strategi metodik pembelajaran, (5) rajin membaca baik tekstual maupun kontekstual untuk menggali dan menambah wawasan baru, (6) mampu bersosialisasi, berinteraksi dalam lingkungan sosial, seperti orang tua/ wali, dan lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan itu semua, Pendidik diharapkan bersedia mengembangkan keilmuannya dengan melanjutkan kualifikasi akademiknya ke jenjang yang lebih tinggi.³³

Pendidik harus terus-menerus mengasah kompetensinya sebagai tenaga professional. Arus globalisasi mempengaruhi dinamika kehidupan suatu masyarakat dan akan terjadi singgungan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidak selarasan dengan semangat yang hendak dikembangkan oleh Pendidik.³⁴ Memahami karakteristik masyarakat lokal dan mempelajari nilai-nilai filosofisnya akan mampu memudahkan Pendidik dalam melaksanakan tugasnya.³⁵ Seirama dengan ini, seorang Pendidik harus menguasai kecakapan sosial yang baik. Yaitu keahlian menyangkut berbagai keterampilan yang berhubungan dengan masyarakat. Seluruh *stakeholder* Sekolah harus

³³ <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-guru-profesional>, diakses hari Jum'at, 11 Oktober 2019, pukul 14.01 WIB.

³⁴ Zulqarnain, *Sejarah Pemikiran Bidang Ketenagaan Pendidikan*, dalam Dedi Wahyudi (ed.), *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam dari Klasik, Tengah, hingga Modern*, (Yogyakarta: Qoulum Pustaka, 2014), hlm. 158.

³⁵ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 211.

memiliki sikap inklusif, menghargai kemajemukan etnik, budaya, agama. Membangun kebersamaan dalam sosial dan profesi.³⁶

Di samping itu Pendidik harus memposisikan sebagai Pemikir strategik, yaitu segenap daya upaya untuk melakukan pendekatan menyeluruh terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran pada periode, situasi dan kondisi tertentu. Dinamika yang terus berubah dan berkembang, menuntut Pendidik memperluas, memperbarui keilmuannya. Di sisi lain, semakin banyaknya produk undang-undang pendidikan, dirasakan Pendidik cukup mempersempit gerak dalam mengekspresikan strategik metode baru. Sehingga langkah-langkah inovatif harus mengedepankan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi benturan vertikal-horisontal, apalagi sampai ke ranah hukum.

Masyarakat memberi kepercayaan dalam kerja Pendidik sebagai Pengajar profesional variatif, dengan memberi penguatan, motivasi dukungan moral finansial kepada putra-putrinya. Masyarakat mempercayai Pendidik yang kompeten sebagai kunci keberhasilan putra-putrinya di saat ini dan mendatang. Untuk itu, Pendidik diharapkan mempunyai pengertian mendalam dan menyeluruh terhadap kemajuan Peserta didik supaya harapan dari *steakholder* bisa tercapai. Meskipun Peserta didik berasal dari kelas ekonomi dan latar belakang berbeda, masyarakat mengharapkan kepada Pendidik selalu sabar menghadapi mereka, bahwa mereka memiliki potensi masing-masing yang bisa untuk dibanggakan.³⁷

³⁶ Michelle Dawn Boucher. *Social Competence Education for Pre-Service Teachers*, (California State University: Sacramento, 2012), p. 7. dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/guru-harus-memiliki-kompetensi-sosial-yang-baik/>, diakses hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 15.52 WIB.

³⁷ <https://www.kompasiana.com/lilisafitri25/5adda7b2cbe523709a16d243/harapan-masyarakat-dari-seorang-guru#>, diakses hari Jum'at, 11 Oktober 2019, pukul 16.05 WIB.

C. KESIMPULAN

Demokratisasi pendidikan menghendaki tercapainya sinergitas kompetensi peserta didik baik secara kognitif-psikomotorik-afektif-spiritual. Untuk keberhasilan mewujudkan tujuan pendidikan secara komprehensif, lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga harus bersinergi harmonis. Untuk mencapai sinergitas harus melakukan langkah-langkah kongkret yang dibingkai dalam semangat komunikasi dan dialog. Mendalami kondisi sosiologis, geografis, dan psikologi masyarakat diperlukan supaya pendidikan menjadi tepat sasaran dan tujuan sehingga perubahan demi perubahan menuai kesuksesan. Karena bisa jadi, kegagalan-kegagalan pada Peserta didik bukan disebabkan oleh substansi materi yang disampaikan, tetapi pendekatan metode dan strategi kepada mereka yang kurang tepat. Materi yang diajarkan bisa saja merupakan paket dari institusi pemegang otoritas kebijakan, tetapi strategi metode cara menyampaikan materi lebih banyak menjadi tanggungjawab Pendidik. Keberhasilan materi yang dipaketkan adalah tentang bagaimana strategi metode Pendidik mendistribusikan, melakukan transfer ilmu sehingga bisa diterima sepenuhnya oleh Peserta didik.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. 2016. *Sosiologi Pendidikan Islam*, cet. II. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- As'Aril Muhajir. 2016. *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, Cet. III, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Dedi Wahyudi (ed.). 2014. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam dari Klasik, Tengah, hingga Modern*. Yogyakarta: Qoulum Pustaka.
- Endang Soenarya. 2000. *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Irfan Hielmy. t.t.. *Pesan Moral dari Pesantren: Meningkatkan Kualitas Umat Menjaga Ukhuwah*. Bandung: Nuansa.

Toto Suharto. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Moh. Hailami Salim dan Syamsul Kurniawan. 2016. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Musa Asy'arie. 2002. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir*. Yogyakarta: LESFI.

Mujamil Qomar. 2012. *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.

Umar Tirtarahardja dan S. S. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Cet. II.. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Web

http://atthamimy.blogspot.com/2014/11/demokrasi-pendidikan-berbasis-masyarakat_19.html

<https://ilmuseni.com/dasar-seni/pengertian-budaya-lokal-dan-contohnya>
<https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/>

<https://www.kajianpustaka.com/2016/03/kompetensi-sosial.html>

<https://www.kompasiana.com/lilisafitri25/5adda7b2cbe523709a16d243/harapan-masyarakat-dari-seorang-guru#>

<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-guru-profesional>

<https://www.uinjkt.ac.id/id/guru-harus-memiliki-kompetensi-sosial-yang-baik/>

<http://www.nafiun.com/2013/02/budaya-lokal-pengertian-macam-macam-contoh-ciri-ciri.html>